

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridhaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam kurun waktu tahun 2021 dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidak sempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2022
KEPALA DINAS,
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. HJ. ASTINA ABBAS, MT
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19661001 199203 2 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Susunan Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	6
1.4 Peran Strategis	7
1.5 Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja	12
2.3 Indikator Kinerja Utama	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian IKU Tahun 2021	15
3.2 Capaian Kinerja Sasaran	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN :	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU);	
2. Perjanjian Kinerja (Eselon II) Tahun 2021;	
3. Matriks Renstra 2018-2023;	
4. Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2021;	
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.	

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Agar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dinamis maka diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pekerjaan umum dan penataan ruang, kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

I.1. Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang memegang peranan sangat penting dalam proses pembangunan di daerah ini, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

II.2. Susunan Organisasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Bidang, dan UPT. Dengan dibentuknya UPT untuk mendukung peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang. Bagan Struktur organisasi sebagai berikut:



Kepala Dinas

- ✚ Sekretaris yang terdiri atas 3 sub bagian:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub Bagian Keuangan
- ✚ Bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 1. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian.
- ✚ Bidang Bina Marga, meliputi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 2. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian.
- ✚ Bidang Bina Cipta Karya, meliputi:
 1. Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 2. Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian.
- ✚ Bidang Bina Konstruksi, meliputi:
 1. Seksi Pengaturan Tata Teknis;
 2. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian.
- ✚ Bidang Tata Ruang, meliputi:
 1. Seksi Pengaturan Dan Pengembangan;
 2. Seksi Pengendalian Dan Penertiban; dan
 3. Seksi Data Base Dan Informasi.
- ✚ Bidang Bina Teknik Dan Perencanaan, meliputi:
 1. Seksi Teknik Dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Teknik Dan Perencanaan Bina Marga; dan
 3. Seksi Teknik Dan Perencanaan Cipta Karya.
- ✚ UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jeneberang, meliputi:
 1. Kepala UPT;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelaksanaan;
4. Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Saddang, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelaksanaan;
4. Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelaksanaan;
4. Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan Larona, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelaksanaan;
4. Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

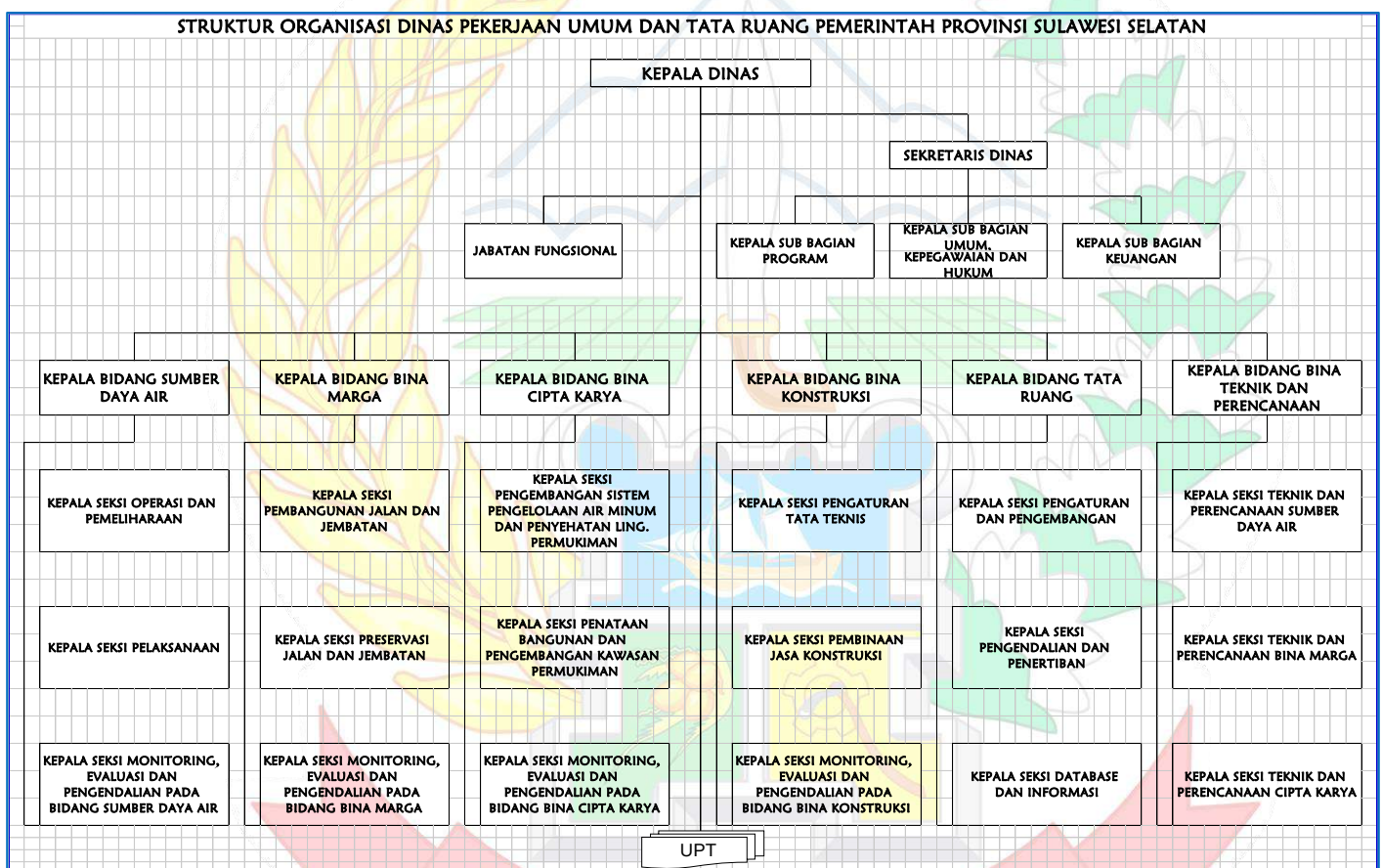
✚ UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian dan Kendali Mutu;
4. Seksi Penyelidikan dan Pengkajian Material; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

✚ UPT Workshop dan Peralatan, meliputi:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan;
4. Seksi Bahan dan Penanggulangan Tanggap Darurat; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:



I.3 Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021 Jumlah data terpilah Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu sebanyak 569 Orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan komposisi 168 orang Perempuan dan 401 orang Laki-Laki.

Tabel I-1

Jumlah data terpilah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
S.3	1	0	1	0,18
S.2	45	35	80	14,06
S.1	138	83	221	38,84
D3	3	7	10	1,76
SMA/ sederajat	190	42	232	40,77
SMP	15	1	16	2,81
SD	9	-	9	1,58
Total	401	168	569	100,00

Tabel I-2

Jumlah data terpilah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	15	3	18
3.	Eselon IV	43	9	52
4.	Fungsional Pelaksana (Staf)	2	2	4
5.	Fungsional Pelaksana (Ahli/Terampil)	4	4	8
	Total			

Tabel I-3

Jumlah data terpilah pegawai berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Gol. IV	30	14	44
2.	Gol. III	144	95	239
3.	Gol. II	222	51	273
4.	Gol. I	13	-	13
	Total	409	160	569

I.4 Peran Strategis

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut:

1. Akses dan kemantapan jalan

Membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi;

2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

3. Pencapaian SPM Air Minum

Belum maksimal pelayanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang merupakan kewenangan provinsi.

4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik

5. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja

6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru

Kawasan strategis terbagi menjadi kepentingan ekonomi; sosial; pertahanan dan keamanan; budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju

perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

8. Pencapaian SPM Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi.

9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel. I-4

Aspek Permasalahan Pelayanan dan Isu-Isu Strategis

No.	Aspek -Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi, dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1.	Sumber Daya Air:	Kondisi DI Provinsi belum optimal	1. Ketimpangan wilayah	1. jalan	Pembangunan yang diarahkan untuk menunjang kawasan strategis, PKW, serta kawasan pertumbuhan baru, serta Prioritas untuk pencapaian indikator SDGs/TPB	1. Akses dan kemantapan jalan
2.	Air Minum Persampahan, Air Limbah Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Akses infrastruktur dasar belum memenuhi SPM	2. Pelayanan dasar dan daya saing daerah	2. Prioritas infrastruktur irigasi		2. Infrastruktur Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air
3.	Jalan	Kondisi kemantapan jalan masih rendah	3. Ketimpangan kondisi jalan	3. Fasilitas penunjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		3. Pencapaian SPM Air Minum
4.	Penataan Ruang	Pengendalian dan Perencanaan Tata Ruang belum optimal	4. Akses 3T	4. Akses daerah terisolir		4. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan
			5. Dukungan infrastruktur industri dan pariwisata	5. Fasilitas bangunan gedung untuk layanan publik dan sosial ekonomi masyarakat		5. Layanan Jasa konstruksi
			6. Pengelolaan air baku	6. Pengelolaan sumber daya air		6. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru
			7. Ketahanan kebencanaan	7. Peningkatan kulaitas lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan ruang		7. Ketaatan
			8. Kompetensi ahli konstruksi dan ketertiban pelaksanaan konstruksi			
			9. Alternatif			

No.	Aspek -Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi, dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
5.	Jasa Konstruksi:	Ketersediaan informasi dan tenaga ahli belum mumpuni	Pembiayaan infrastruktur			pemanfaatan ruang 8. Pencapaian SPM Sanitasi 9. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

I.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas dan renja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian IKU Tahun 2021

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJM.

2) Realisasi Kinerja Lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan strategis dan teknis yang telah diterbitkan yang digunakan sebagai panduan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan (2) capaian sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel.

3) Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

4. Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Yang akan di laksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar Penilaian dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2021, yang di susun berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Strategis, yang di Implementasikan melalui Program dan Kegiatan, yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023. Yang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin di capai 5 (Lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi yang telah tertuang dalam Rencana Strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak terkait dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peranan strategis dalam mendukung peningkatan pertanian. Akuntabilitas kinerja kebijakan pemerintah daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi pada era otonomi daerah saat ini. Dan Otonomi daerah pada satu sisi telah memberikan keleluasan yang sangat besar kepada daerah untuk lebih mandiri menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya. Namun disisi lainnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan menjadi syarat bagi kemandirian tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung akuntabilitas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan program dan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan implementasi Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan serta Keterkaitannya dapat diuraikan sebagai berikut:

✚ Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

➤ Visi dan Misi

Visi **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** dimana :

Inovatif, adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produktif, adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif, adalah kemampuan menghasilkan SDM, produk barang, dan jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Inklusif, adalah kondisi system dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali;

Berkarakter, adalah spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Penetapan Misi berdasarkan pada 4 fungsi utama pemerintahan, yakni Melayani (Services), membangun (Development), Memberdayakan (Empowerment) dan Mengatur (Regulating). Berdasarkan fungsi utama tersebut, maka dijabarkan 5 Misi yaitu :

Misi 1. “ Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif ”

Misi 2. “ Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel ”

Misi 3 “ Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif ”

Misi 4 “ Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter ”

Misi 5 “ Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan ”

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2021. Target ditetapkan untuk indikator kinerja, baik

indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, outcome). Perjanjian kinerja tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II-1
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Prov. Sul-Sel TA. 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	BB
		2 Persentase temuan material	0 %
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	3 Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30 %
		4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79 %
3	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06 %
		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24 %
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47 %
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100 %
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80 %
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70 %
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80 %
		13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13 %

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja IKU juga telah mengalami revisi terhadap target-target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II-2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sul-Sel
Tahun Anggaran 2021

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	2	3
1	Nilai Sakip Dinas PUTR	$(A \times 0,35) + (B \times 0,20) + (C \times 0,15) + (D \times 0,10) + (E \times 0,20)$ Keterangan: A : Perencanaan Kinerja B : Pengukuran Kinerja C : Pelaporan Kinerja D : Evaluasi Kinerja E : Capaian Kinerja
2	Persentase temuan material	$\frac{\text{Nilai Temuan}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100 \%$
3	Rasio kemantapan jalan provinsi	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik \& sedang}}{\text{panjang seluruh Ruas Jalan Provinsi}} \times 100 \%$
4	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	$\frac{\text{Jumlah Ruas Terisolir}}{\text{Jumlah seluruh ruas jalan provinsi}} \times 100 \%$
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas kewenangan provinsi yang dilayani jaringan irigasi (ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi}} \times 100 \%$
6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir (ha)}}{\text{Luas wilayah sulawesi selatan}} \times 100 \%$
7	Persentase Penduduk berakses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah RT berakses air minum layak}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$
8	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	$\frac{\text{Jumlah pembangunan + pendampingan bangunan gedung}}{\text{Jumlah gedung yang direncanakan terbangun}} \times 100 \%$
9	Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah layanan sesuai indikator (13 indikator)}} \times 100 \%$
10	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah kawasan strategis + kawasan pert. baru yang direncanakan}}{\text{Jumlah seluruh kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan baru yang direncanakan}} \times 100 \%$
11	Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah kawasan sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah seluruh kawasan}} \times 100 \%$
12	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah RT terlayani persampahan}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$
13	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah RT terlayani persampahan}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

3.1 Capaian IKU Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil Capaian	%
1	2	3	4	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	BB	BB	100%
		2 Persentase temuan material	0 %	3,02 %	96,98%
2	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan provinsi	3 Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30%	70,01%	96,83%
		4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79%	77,12%	107,42%
3	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%
		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24%	1,26%	99,97
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47%	91,18%	110,56%
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100%	85%	85%
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80%	80%	100%
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70%	72,2%	99,31%
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80%	80%	100%
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%
		13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13%	66,21%	88,12%

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang sepanjang tahun 2021 sebagaimana pada uraian berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Aset Perangkat Daerah”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Dinas PUTR;
2. Persentase temuan material.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUTR dan Persentase Temuan Material diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	REALISASI CAPAIAN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Nilai Sakip Dinas PUTR	BB	BB	100%
2	Persentase temuan material	0 %	3,02 %	96,98%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambarkan bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Nilai Sakip Dinas PUTR	B	BB	A
2	Persentase temuan material	0%	3,02 %	0%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Nilai Sakip Dinas PUTR	BB	A	-
2	Persentase temuan material	3,02 %	0%	-

1. Nilai Sakip Dinas PUTR

Nilai Sakip Dinas PUTR pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar BB

dari target BB.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

2. *Persentase temuan material*

Persentase temuan material pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 3,02% dari target 0%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

❖ Permasalahan

- Pengelolaan asset temuan material karena terdapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan antara pencairan dari hasil pemeriksaan temuan-temuan tersebut telah diselesaikan.

❖ Solusi

- Pelaksanaan konstruksi serta melibatkan APIP selaku Whistle Blower.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 87.178.743.392,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 81.766.093.999,- atau 93,79%, realisasi fisik 99,40%.

Tabel III-6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	87.178.743.392	81.766.093.999	93,79	99,40

f. **Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan capaian kinerja **Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah sebesar 97,48%**, yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.
- 2) **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.
- 3) **Kegiatan** : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.
- 4) **Kegiatan** : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.
- 5) **Kegiatan** : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.
- 6) **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana..
- 7) **Kegiatan** : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang tidak dilaksanakan
- 8) **Kegiatan** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.
- 9) **Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Akses dan Kemantapan Jalan Provinsi”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Rasio kemantapan jalan provinsi;
2. Persentase penanganan ruas jalan terisolir.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Rasio kemantapan jalan provinsi dan Persentase penanganan ruas jalan terisolir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	REALISASI CAPAIAN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Rasio kemantapan jalan provinsi	72,30%	70,01%	96,83%
2	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79%	77,12%	107,42%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Rasio kemantapan jalan provinsi	66,62%	70,01%	74.24%
2	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	12,82%	77,12%	74.25%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-9

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Rasio kemantapan jalan provinsi	70,01%	75.09%	75%
2	Persentase penanganan ruas jalan terisolir	77,12%	80%	-

1. Rasio Kemantapan Jalan Provinsi

Rasio kemantapan jalan provinsi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 70,01% dari target 72,30%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Menjaga dan mencegah kerusakan pada jalan kondisi Mantap (Baik dan sedang).

2. Persentase Penanganan Ruas Jalan Terisolir

Persentase ruas jalan terisolir pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 77,12% dari target 71,79%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun jalan pada wilayah terisolir yang menjadi ruas jalan provinsi dan Mengoptimalkan dukungan penanganan jalan Kabupaten/Kota pada wilayah terisolir.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak tuntas yang berpengaruh pada

capaian panjang jalan kondisi mantap, selain itu terdapat beberapa kerusakan jalan/penurunan kondisi yang tidak diantisipasi, yang terjadi karena usia jalan serta bencana dan gangguan lainnya.

❖ Solusi

- Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Mengoptimalkan penanganan jalan melalui pemeliharaan jalan untuk mencegah penurunan kondisi jalan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 690.106.475.266,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 644.681.224.184,- atau 93,42%, realisasi fisik 96,81%.

Tabel III-10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	690.106.475.266	644.681.224.184	93,42	96,81

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan capaian kinerja **Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 70,01%** dan **Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat sebesar 77,12%** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan** : Penyelenggaraan Jalan Provinsi, terdiri dari 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

SASARAN STRATEGIS 3

“Menigkatnya Cakupan Layanan Irigasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi;
2. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dan Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-11

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2021	REALISASI CAPAIAN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%
2	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24%	1,26%	99,97%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya dan indikator kinerja Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya, seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-12

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%
2	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	NA	1,26%	99,97%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-13

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	64%	63,37%	-
2	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,26%	1,22%	-

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 64% dari target 60,06%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (39 Daerah Irigasi Sawah dan Daerah Irigasi Tambak Prioritas) dan Menambah jaringan untuk menambah luasan lahan pertanian beririgasi.

2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 1,26% dari target 1,24%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir yang terjadi setiap tahun pada wilayah sungai Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan agar kerusakan yang terjadi akibat banjir pada sarana dan prasarana

sungai dapat diketahui dan diinventarisasi yang akan menjadi bahan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan dibuatkan daftar skala prioritas.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi inventarisasi sarana dan prasarana sungai sumber daya air dan agar masyarakat sekitar daerah aliran sungai dapat melakukan antisipasi banjir yang akan terjadi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pengukuran capaian kinerja irigasi menggunakan e-paksi yang berdampak pada penyesuaian parameter pengukuran.
- Penanganan rawan banjir dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah dan pemerintah daerah.

❖ Solusi

- Dibutuhkan kajian rutin untuk mengukur kinerja penanganan rawan banjir.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 190.143.543.573,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 170.480.792.689,- atau 89,66%, realisasi fisik 95,86%.

Tabel III-14

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	190.143.543.573	170.480.792.689	89,66	95,86

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dengan capaian kinerja **Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)** sebesar **76%** dan **Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai** sebesar **100%** terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan** : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
- 2) **Kegiatan** : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 4

“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Air Minum”

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum sasaran ini merupakan indikator kinerja yang utama dalam pencapaian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Sulawesi Selatan yang cukup besar.

Indikator sasaran dalam Meningkatkan kapasitas Pemenuhan Air Minum Layak sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk berakses air minum layak.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Penduduk berakses air minum layak diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-15
Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja
1	Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47%	91,18%	110,56%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambarkan bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun lalu sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-16

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase Penduduk berakses air minum layak	85,90%	91,18%	86,28%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-17

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase Penduduk berakses air minum layak	91,18%	89.62%	-

Persentase Penduduk berakses air minum layak di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 100% dari target 82,47%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Persentase Penduduk berakses air minum layak adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Layanan akses air minum yang belum tercapai dan layanan provinsi hanya pada air minum curah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota.

❖ Solusi

- Capaian layanan air minum sangat bergantung pada layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penguatan dan peningkatan peran Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan layanan air minum harus didukung melalui pembinaan serta pengawasan pelaksanaan layanan untuk mencapai target nasional. Selain itu, penyediaan layanan air minum curah regional harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kedepan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 115.527.100,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 102.723.200,- atau 88,92%, realisasi fisik 100%.

Tabel III-18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	115.527.100	102.723.200	88,92	100

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** dengan capaian kinerja **Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota sebesar 100%** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan** : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 5

“Berkembangnya Fasilitas Gedung Penunjang Layanan”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung;

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-19

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian 2021	Realisasi Capaian 2021	Capaian Kinerja
1	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100%	85%	85%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-20

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung	95,56%	85%	100%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-21

**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
Dengan Target RPJM dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung	85%	100%	-

Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 85% dari target 100%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Membangun gedung/ bangunan layanan publik, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kebencanaan serta penunjang fungsinya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pekerjaan pembangunan fisik di beberapa paket tidak tuntas.

❖ Solusi

- Optimalisasi pelaksanaan dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 113.003.354.905,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 106.792.390.587,- atau 94,50%, realisasi fisik 94,98%.

Tabel III-22

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Penataan Bangunan Gedung	113.003.354.905	106.792.390.587	94,50	94,98

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan capaian kinerja **Persentase Bangunan Pemerintah Yang di Fasilitas** sebesar **85%** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan** : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 6

“Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-23

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian 2021	Realisasi Capaian 2021	Capaian Kinerja
1	Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80%	80%	100%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-24

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	70%	80%	90%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020
Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80%	100%	-

Persentase Pelaksanaan layanan jasa konstruksi pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 80 % dari target 80 %.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

- ❖ Permasalahan
 - Ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan.
- ❖ Solusi
 - Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 880.355.900,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 689.244.392,- atau 78,29%, realisasi fisik 95,71%.

Tabel III-26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	880.355.900	689.244.392	78,29	95,71

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** dengan capaian kinerja **Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 50%** terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) **Kegiatan** : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.
 - 2) **Kegiatan** : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.
 - 3) **Kegiatan** : Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 7

“Berkembangnya Infrastruktur Penunjang Kawasan Strategis Dan Pusat Pertumbuhan Baru”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase

kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-27

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian 2021	Realisasi Capaian 2021	Capaian Kinerja
1	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70 %	72,2%	99,31%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-28

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	32,14%	72,2%	77,20%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-29
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,2%	81.8%	-

Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 72,2% dari target 72,70%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya menata kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi & pariwisata serta rest area.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata membutuhkan keterlibatan multi sektor dan multi aktor. Adanya kewenangan dan kepemilikan asset yang berbeda dalam satu kawasan membutuhkan sinergi dan integrasi dalam pengembangan kawasan. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan lahan dan administrasi pengelolaan asset, serta pemanfaatan serta keberfungsian sarana prasarana yang telah dibangun.

❖ Solusi

- Selain pembangunan infrastruktur, dibutuhkan penguatan pada penyiapan administrasi, serta penyiapan pemanfaatan setelah pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian

sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 31.611.896.607,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.276.454.655,- atau 89,45%, realisasi fisik 93,29%.

Tabel III-30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	31.611.896.607	28.276.454.655	89,45	93,29

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya** dengan capaian kinerja **Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya sebesar 9 Kawasan**, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) **Kegiatan** : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 8

“Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang”

Sasaran ini didukung oleh satu indikator sebagai berikut :

1. Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-31

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian 2021	Realisasi Capaian 2021	Capaian Kinerja
1	Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80%	80%	100%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-32

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	75%	80%	85%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-33

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**Dengan Target RPJM dan Target Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80%	90%	-

Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 80% dari target 80%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang dan mengoptimalkan pendataan dan pengendalian.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

- ❖ Permasalahan
 - Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal.
- ❖ Solusi
 - Mengoptimalkan pendataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 12.460.845.317,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.335.853.137,- atau 99%, realisasi fisik 99,86%.

Tabel III-34

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	12.460.845.317	12.335.853.137	99,00	99,86

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan capaian kinerja **Rasio ketaatan pemanfaatan ruang sebesar 0,80%**, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) **Kegiatan** : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

- 2) **Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.
- 3) **Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.
- 4) **Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 9

“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Sanitasi”

Sasaran ini didukung oleh dua indikator sebagai berikut :

1. Persentase penduduk berakses air limbah domestik;
2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Pencapaian sasaran ini dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase penduduk berakses air limbah domestik dan Persentase sampah perkotaan yang tertangani, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-35

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian 2021	Realisasi Capaian 2021	Capaian Kinerja
1	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13%	66,21%	88,12%

Dari uraian tabel capaian indikator sasaran tergambar bahwa dari indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun sebelumnya seperti digambarkan tabel berikut ini:

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-36

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	Hasil Capaian Per Tahun		Target Capaian 2022
		2020	2021	
1	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	68,44%	91,58%	91,02%
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	85,39%	66,21%	74,93%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-37

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Dengan Target RPJM dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2021	Kondisi Capaian Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	Target Nasional (jika ada)
1	Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	91,58%	93,55%	-
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	66,21%	74,72%	-

1. Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik

Persentase Penduduk berakses air limbah domestik pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 91,58% dari target 87,80%.

Capaian pada indikator ini mendukung untuk tercapainya Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT.

2. Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani

Persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun 2021 memperlihatkan hasil sebesar 66,21% dari target 75,13%.

Capaian pada indikator ini mendukung tercapainya untuk mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Permasalahan dan Solusi :

❖ Permasalahan

- Layanan air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;
- Layanan persampahan belum optimal dan layanan provinsi hanya pada TPA Regional.

❖ Solusi

- Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;
- Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp. 209.347.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 175.628.000,- atau 83,89%, realisasi fisik 100%.

Tabel III-38

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2021	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	102.805.500	97.467.000	94,81	100
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	106.541.500	78.161.000	73,36	100

f. **Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah:

1. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** dengan capaian kinerja **Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota** sebesar **100%**, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) **Kegiatan** : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan capaian kinerja **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)** sebesar **100%** dan **Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota (SPM)** sebesar 100%, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1) **Kegiatan** : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Penggunaan biaya untuk pencapaian sembilan sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.125.710.089.060,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.045.300.404.843,- atau 92,86%, realisasi fisik 97,48%.

Tabel III-39

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO.	SASARAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	87.178.743.392	81.766.093.999	93,79	
2	Meningkatnya akses dan kemandirian jalan provinsi	690.106.475.266	644.681.224.184	93,42	
3	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	190.143.543.573	170.480.792.689	89,66	

NO.	SASARAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran	Ket.
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	115.527.100	102.723.200	88,92	
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	113.003.354.905	106.792.390.587	94,50	
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	880.355.900	689.244.392	78,29	
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	31.611.896.607	28.276.454.655	89,45	
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	12.460.845.317	12.335.853.137	99,00	
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	102.805.500	97.467.000	94,81	
		106.541.500	78.161.000	73,36	
TOTAL		1.125.710.089.060	1.045.300.404.843	92,86	

2. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan / penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2021 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, mempunyai total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.482.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.287.562.800,- (92,13 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-40

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	92,13
1	Retribusi penyewaan tanah dan bangunan	53.580.000,00	46.130.000,00	86,10
	- Sewa rumah dinas	41.820.000,00	40.130.000,00	95,96
	- Sewa mess malino	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	- Sewa kantin	5.760.000,00	-	-

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
2	Retribusi penyewaan tanah	134.400.000,00	163.200.000,00	121,43
	- Sewa kantor kas (bank Sulselbar)	134.400.000,00	163.200.000,00	121,43
3	Retribusi pemakaian laboratorium	2.000.000.000,00	1.841.332.800,00	92,07
	- Sewa laboratorium	2.000.000.000,00	1.841.332.800,00	92,07
4	Retribusi pemakaian kendaraan bermotor	295.000.000,00	236.900.000,00	80,31
	- Sewa alat berat	295.000.000,00	236.900.000,00	80,31

b. Belanja

Untuk tahun 2021 ini, total alokasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1.125.710.089.060,- dan total realisasi sebanyak Rp. 1.045.300.404.843 (92,86%), dan realisasi fisik 96,34%.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III-41
Anggaran dan Realisasi Dinas

SUMBER ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp.)	(%)	FISIK (%)
I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.482.980.000,00	2.287.562.800,00	92,13	100
II. Belanja	1.125.710.089.060	1.045.300.404.343	92,86	97,48
TOTAL (II-I)	1.123.227.109.060	1.043.012.841.543	92,86	97,48

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Hasil Capaian	%	Kriteria
1	2	3	4	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	BB	BB	100%	Sangat Tinggi
		2 Persentase temuan material	0 %	3,02 %	96,98%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akses dan kemandirian jalan provinsi	3 Rasio kemandirian jalan provinsi	72,30%	70,01%	96,83%	Sangat Tinggi
		4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79%	77,12%	107,42%	Sangat Tinggi
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06%	64%	106,56%	Sangat Tinggi
		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24%	1,26%	99,97%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47%	91,18%	110,56%	Sangat Tinggi
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100%	85%	85%	Tinggi
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70%	72,2%	99,31%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80%	91,58%	104,30%	Sangat Tinggi
		13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13%	66,21%	88,12%	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN					99,61	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, meskipun demikian tingkat capaian ini masih berada pada kriteria Sangat Tinggi karena berada pada angka 99% ke atas.

4.2 Permasalahan Dan Solusi

Terdapat beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Sulawesi Selatan terkait dengan kondisi pola pikir, lemahnya kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, sarana dan dukungan pembiayaan sehingga mempengaruhi :

Permasalahan :

1. Pengelolaan asset temuan material karena terdapat perbedaan perhitungan volume pekerjaan antara pencairan dari hasil pemeriksaan temuan-temuan tersebut telah diselesaikan;
2. Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak tuntas yang berpengaruh pada capaian panjang jalan kondisi mantap, selain itu terdapat beberapa kerusakan jalan/penurunan kondisi yang tidak diantisipasi, yang terjadi karena usia jalan serta bencana dan gangguan lainnya;
3. Pengukuran capaian kinerja irigasi menggunakan e-paksi yang berdampak pada penyesuaian parameter pengukuran;
4. Layanan akses air minum yang belum tercapai dan layanan provinsi hanya pada air minum curah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Pekerjaan pembangunan fisik di beberapa paket tidak tuntas;
6. Ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan;
7. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata membutuhkan keterlibatan multi sektor dan multi aktor. Adanya kewenangan dan kepemilikan asset yang berbeda dalam satu kawasan membutuhkan sinergi dan integrasi dalam pengembangan kawasan. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan lahan dan administrasi pengelolaan asset, serta pemanfaatan serta keberfungsian sarana prasarana yang telah dibangun;

8. Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal;
9. Layanan air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional, sedangkan cakupan layanan keseluruhan merupakan target dan kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Layanan persampahan belum optimal dan layanan provinsi hanya pada TPA Regional;

 Solusi :

1. Pelaksanaan konstruksi serta melibatkan APIP selaku Whistle Blower;
2. Membangun dan memperbaiki jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan Mengoptimalkan penanganan jalan melalui pemeliharaan jalan untuk mencegah penurunan kondisi jalan;
3. Dibutuhkan kajian rutin untuk mengukur kinerja penanganan rawan banjir;
4. Capaian layanan air minum sangat bergantung pada layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penguatan dan peningkatan peran Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan layanan air minum harus didukung melalui pembinaan serta pengawasan pelaksanaan layanan untuk mencapai target nasional. Selain itu, penyediaan layanan air minum curah regional harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan kedepan;
5. Optimalisasi pelaksanaan dari tahap perencanaan pengadaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan;
6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi;
7. Selain pembangunan infrastruktur, dibutuhkan penguatan pada penyiapan administrasi, serta penyiapan pemanfaatan setelah pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan;
8. Mengoptimalkan pendataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan air limbah domestik pada IPLT;
10. Mengoptimalkan peran kabupaten kota pengelolaan persampahan pada TPA.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. AP. PETTARANI No. 90 TELP. 0411-448903
MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 302/III/Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023;
- b. bahwa penyusunan perubahan RPJMD dan Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 telah selesai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
7. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 3 Maret 2021


Kepala Dinas,

PROF. DR. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng.
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c
NIP : 19701108 199412 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 302/III/Tahun 2021

TANGGAL : 3 Maret 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

 2. Tugas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2019.

 3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban tersebut sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.
-

Lampiran 2 :

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Misi 1. Sasaran 1 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	Hasil Penilaian Sakip (Point)	Sekretaris
		2 Persentase temuan material	$\frac{\text{Nilai Temuan}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100 \%$	
Misi 2. Sasaran 3 RPJMD : Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur				
2	Meningkatnya akses dan kemandapan jalan provinsi	3 Rasio kemandapan jalan provinsi	$\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik \& sedang}}{\text{Panjang Seluruh Ruas Jalan Provinsi}} \times 100 \%$	Bidang Bina Marga
		4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	$\frac{\text{Pembangunan jalan terisolir}}{\text{Jumlah ruas jalan terisolir provinsi}} \times 100 \%$	
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas kawenangan provinsi yg dilayani jaringan irigasi (ha)}}{\text{Luas Di kewenangan Provinsi}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air
		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir}}{\text{Jumlah seluruh Kab/Kota rawan banjir}} \times 100 \%$	
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah RT berakses air minum layak}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$	Bidang Cipta Karya
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	$\frac{\text{Jumlah pembangunan + pendampingan bangunan gedung}}{\text{Jumlah gedung yang direncanakan terbangun}} \times 100 \%$	
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah layanan sesuai indikator LPPD (13 indikator)}} \times 100 \%$	Bidang Bina Konstruksi

myls

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
Misi 3. Sasaran 4 RPJMD : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah				
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis} + \text{Kawasan Pert baru yg direncanakan}}{\text{Jumlah seluruh kawasan strategis dan kaw. pertumb. baru yg direncanakan}} \times 100 \%$	Bidang Tata Ruang
Misi 5. Sasaran 10 RPJMD : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah kawasan sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah seluruh kawasan}} \times 100 \%$	Bidang Tata Ruang
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah RT terlayani layanan ALD}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$	Bidang Cipta Karya
		13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah RT terlayani persampahan}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100 \%$	

Makassar, Maret 2021

Kepala Dinas,


PROF. DR. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19701108 199412 1 001

Lampiran 3 :

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	PROGRAM	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja	Target Kinerja					SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 1. Sasaran 1 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Dinas PUTR	Poin	-	BB	BB	A	A	Sekretaris	
		% temuan material	%	0	0	0	0	0		
Misi 2. Sasaran 3 RPJMD : Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur										
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	61.52	65.90	72.3	74.24	75.09	Bidang Bina Marga	
		% penanganan ruas jalan terisolir	%	20,48	42.72	71.79	74.25	80		
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	59.33	60.06	60.06	61.72	63.37	Bidang Sumber Daya Air	
		% Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	1,26%	1,25%	1,24%	1,23%	1,22%		
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	% Penduduk berakses air minum layak	%	74.08	78.74	82.47	86.28	89.62	Bidang Cipta Karya	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	% ketersediaan layanan konstruksi bangunan/ gedung	%	100	100	100	100	100		
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	% Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	%	60	70	80	90	100	Bidang Bina Konstruksi	

4/15

NO.	PROGRAM	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja	Target Kinerja					SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 3. Sasaran 4 RPJMD : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi unggulan daerah										
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	%	31.8	59	72.7	77.2	81.8	Bidang Tata Ruang	
Misi 5. Sasaran 10 RPJMD : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim										
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%	70	75	80	85	90	Bidang Tata Ruang	
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	% Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	77.97	85.03	87.80	91.02	93.55	Bidang Cipta Karya	
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	% Sampah perkotaan yang tertangani	%	57.74	75.50	76.13	74.93	74.72		

Makassar, Maret 2021

Kepala Dinas, *[Signature]*



PROF. DR. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19701108 199412 1 001

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA (PK)

TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Rudy Djamaluddin, M.Eng**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : **Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

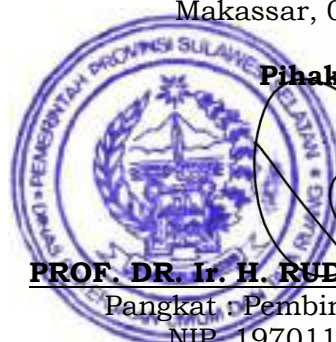
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 01 Februari 2021



Pihak Kedua,

PROF. DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.



Pihak Pertama,

PROF. DR. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng.

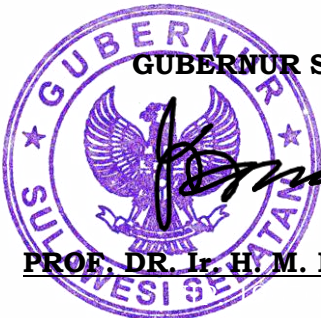
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701108 199412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset perangkat daerah	1 Nilai Sakip Dinas PUTR	BB
		2 Persentase temuan material	0 %
2	Meningkatnya akses dan kemandapan jalan provinsi	3 Rasio kemandapan jalan provinsi	72,30 %
		4 Persentase penanganan ruas jalan terisolir	71,79 %
3	Menigkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	5 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	60,06 %
		6 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir	1,24 %
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	7 Persentase Penduduk berakses air minum layak	82,47 %
5	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	8 Persentase ketersediaan layanan konstruksi bangunan/gedung	100 %
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	9 Persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi	80 %
7	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	10 Persentase kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	72,70 %
8	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	11 Persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	80 %
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	12 Persentase Penduduk berakses air limbah domestik	87,80 %
		13 Persentase sampah perkotaan yang tertangani	75,13 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 103.506.887.062,00
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 239.144.922.402,00
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 101.989.809.567,00
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 160.619.100,00
5. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 164.376.164.792,00
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 999.859.900,00
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 75.269.455.924,00
8. Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Rp. 1.955.622.800,00
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 160.961.000,00
10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 160.995.500,00
TOTAL	Rp. 687.725.298.047,00

Makassar, 01 Februari 2021



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PROF. DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.



KEPALA DINAS

PROF. DR. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19701108 199412 1 001

Lampiran 3

MATRIKS RENSTRA 2018-2023

Table T-C.27 (Verifikasi Akhir)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Kendala	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			0 0 X X X X 0 1	1.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas (lap)	1	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	26.554.000,00	1 Lap	29.209.400,00	1 Lap	32.130.340,00	3 Lap	87.893.740,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0 0 X X X 0 1	1.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan akhir tahun Dinas (lap)	1	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	26.167.100,00	1 Lap	28.783.810,00	1 Lap	31.662.191,00	3 Lap	86.613.101,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0 0 X X X 0 1	1.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, triwulan, & semesteran SKPD	Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran Dinas (lap)	1	0 Lap	-	0 Lap	-	12 Lap	1.030.100.900,00	12 Lap	1.133.110.990,00	12 Lap	1.246.422.089,00	36 Lap	3.409.633.979,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT Workshop dan Peralatan Tersusunnya	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap				12 Lap		36 Lap		
							Tersedianya laporan koordinasi dan laporan keuangan bulanan, triwulan, & semesteran UPT Laboratorium														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Tersusunnya laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wil. III	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		36 Lap				
								Tersusunnya laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wil. II	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		36 Lap				
								Tersusunnya laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wil. I (Lao)	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		36 Lap				
								Tersusunnya laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wil. VI	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		36 Lap				
								Tersusunnya laporan keuangan Bulanan, triwulanan, & semesteran UPT Wil. V	1	0 Lap		0 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		36 Lap				
			0	0	X . X X . 0	1.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0 Lap	-	0 Lap	-	4 Lap	23.219.100,00	4 Lap	25.541.010,00	4 Lap	28.095.111,00	12 Lap	76.855.221,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			0	0	X . X X X	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100 %	-	100 %	-	100 %	329.375.800,00	100 %	389.729.780,00	100 %	428.702.758,00	100 %	1.147.808.338,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 3	04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	329.375.800,00	1 Lap	389.729.780,00	1 Lap	428.702.758,00	3 Lap	1.147.808.338,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS Sadran	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS leneherang	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS Walanae	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS Laboratorium Penelitian	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT WS Workshop dan Peralatan	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		0 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset pada UPT	1	0 Lap		0 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		3 Lap		
			0	0	X . X X	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	50.088.533,00	100 %	30.000.000,00	100 %	80.088.533,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X	1.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	38.174.653,00	2 Dok	20.000.000,00	4 Dok	58.174.653,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dok.	-	0 Dok.	-	0 Dok.	-	1 Dok.	11.913.880,00	1 Dok.	10.000.000,00	2 Dok.	21.913.880,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0	1.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1141700600	1279130100 Rupiah	-	1000000000 Rupiah	-	982980000 Rupiah	807.087.720,00	1050000000 Rupiah	887.796.492,00	1200000000 Rupiah	976.576.141,20	5512110100 Rupiah	2.671.460.353,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0	1.0 4	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	120.690.500,00	1 Dok	132.759.550,00	1 Dok	146.035.505,00	3 Dok	399.485.555,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 4	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0 Ranperda/ Perda	-	0 Ranperda/ Perda	-	1 Ranperda/ Perda	497.537.000,00	1 Ranperda/ Perda	547.290.700,00	1 Ranperda/ Perda	602.019.770,00	3 Ranperda/ Perda	1.646.847.470,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 4	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	0	0 OS	-	0 OS	-	2 OS	86.123.620,00	2 OS	94.735.982,00	2 OS	104.209.580,20	2 OS	285.069.182,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 4	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	102.736.600,00	12 Bulan	113.010.260,00	12 Bulan	124.311.286,00	12 Bulan	340.058.146,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								Tersedianya laporan penerimaan retribusi daerah Dinas PUTR (Bulan) Laporan Realisasi penerimaan retribusi pada UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	0	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Laporan Realisasi penerimaan retribusi pada UPT Workshop dan Peralatan (Bulan)	0	0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90	-	90	-	90	1.806.054.200,00	90	1.986.659.620,00	90	2.185.325.582,00	90	5.978.039.402,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X	1.0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	220.000.000,00	1 Unit	242.000.000,00	3 Unit	662.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapan	240	0 Set	-	0 Set	-	646 Set	1.314.935.000,00	646 Set	1.446.428.500,00	646 Set	1.591.071.350,00	646 Set	4.352.434.850,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	646	0 Dok	-	0 Dok	-	646 Dok	86.072.300,00	646 Dok	94.679.530,00	646 Dok	104.147.483,00	646 Dok	284.899.313,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X	1.0 5	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	100	0 %	-	0 %	-	100 %	10.044.300,00	100 %	11.048.730,00	100 %	12.153.603,00	100 %	33.246.633,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 5	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	646	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	63.310.300,00	1 Dok	69.641.330,00	1 Dok	76.605.463,00	1 Dok	209.557.093,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0 Orang	-	0 Orang	-	16 Orang	106.880.300,00	18 Orang	117.568.330,00	20 Orang	129.325.163,00	54 Orang	353.773.793,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 5	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	0	0 Orang	-	0 Orang	-	100 Orang	24.812.000,00	100 Orang	27.293.200,00	100 Orang	30.022.520,00	100 Orang	82.127.720,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100 %	-	100 %	-	100 %	4.117.518.030,00	100 %	3.505.085.765,00	100 %	3.982.482.462,20	100 %	11.605.086.257,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	0	0 Jenis	-	0 Jenis	-	30 Jenis	113.592.800,00	35 Jenis	130.545.800,00	40 Jenis	143.600.380,00	105 Jenis	387.738.980,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. I (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		18 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. II (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		18 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. III (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		10 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. IV (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		21 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. V (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		15 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Wil. VI (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		18 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi	0	0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		21 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT Workshop dan Peralatan	0	0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		8 Jenis		9 Jenis		24 Jenis			
									Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT WSPompengan Larona (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		9 Jenis			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT WS Walanae	0	0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		12 Jenis				
								Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT WS Saddang (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		12 Jenis				
								Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor UPT WS Jeneberang (Jenis)	0	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		22 Jenis				
			0	0	X . X X . 0	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0 Jenis	-	0 Jenis	-	21 Jenis	1.018.882.890,00	22 Jenis	1.023.166.890,00	23 Jenis	1.238.031.936,90	65 Jenis	3.280.081.716,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			0	0	X . X X . 0 1	1.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0 Jenis	-	0 Jenis	-	698 Jenis	1.126.285.890,00	26 Jenis	247.769.980,00	27 Jenis	286.886.740,80	751 Jenis	1.660.942.610,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		9 Jenis				
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		9 Jenis				
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan oada UPT Wil.	0	0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		12 Jenis				
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan oada UPT Wil.	0	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		9 Jenis				
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan oada UPT Wil.	0	0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		6 Jenis		7 Jenis		18 Jenis				
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan oada UPT Wil.	0	0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		11 Jenis		31 Jenis				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Jeneberane	0	0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		3 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Jumlah	0	0 Jenis		0 Jenis		12 Jenis		13 Jenis		14 Jenis		39 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Walanae	0	0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		12 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT WS Pomoenan	0	0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		21 Jenis		22 Jenis		63 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Workshoo dan	0	0 Jenis		0 Jenis		12 Jenis		13 Jenis		14 Jenis		39 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Laboratorium	0	0 Jenis		0 Jenis		50 Jenis		51 Jenis		52 Jenis		153 Jenis		
								Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan pada UPT Pengujian Bahan	100	0 %	-	0 %	-	100 %	105.527.750,00	100 %	116.080.525,00	100 %	127.688.577,50	100 %	349.296.852,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% ketersediaan bahan logistik kantor (%)	0	0 %	-	0 %	-	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.500.000,00	100 %	165.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% Pelaksanaan & ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen Dinas (%)	0	0 %	-	0 %	-	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.500.000,00	100 %	165.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% ketersediaan bahan/material administrasi kantor (%)	0	0 %	-	0 %	-	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.500.000,00	100 %	165.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% Pelaksanaan fasilitasi kunjungan / tamu (Perempuan & laki-laki) (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	33.630.000,00	100 %	36.993.000,00	100 %	40.692.300,00	100 %	111.315.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% Pelaksanaan koordinasi, & konsultasi antar Provinsi, Kab./Kota (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	1.580.949.100,00	100 %	1.739.044.010,00	100 %	1.912.948.411,00	100 %	5.232.941.521,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								% Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	100	0 %	-	0 %	-	100 %	6.145.300,00	100 %	65.730.830,00	100 %	72.303.913,00	100 %	144.180.043,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			000X 00.X X X X 0 1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	% Tersedianya dukungan sistem pemerintahan di Dinas yang berbasis elektronik (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	32.504.300,00	100 %	35.754.730,00	100 %	39.330.203,00	100 %	107.589.233,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100 %	-	100 %	-	100 %	9.760.000,00	100 %	4.536.760.950,00	100 %	5.511.809.600,00	100 %	10.058.330.550,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.100.000.000,00	4 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.100.000.000,00	4 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Terlaksananya pengadaan kebutuhan alat besar pada dinas (Unit)	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	1.000.000.000,00	2 Unit	1.100.000.000,00	4 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan kebutuhan mebel pada dinas (Jenis)		0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	526.024.950,00	2 Jenis	1.100.000.000,00	4 Jenis	1.626.024.950,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas (Jenis)	2	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	9.760.000,00	2 Jenis	10.736.000,00	2 Jenis	11.809.600,00	6 Jenis	32.305.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor yang dibangun (Gedung)		0 Gedung	-	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 Gedung	1.000.000.000,00	1 Gedung	1.100.000.000,00	2 Gedung	2.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100	100 %	-	100 %	-	100 %	21.113.251.199,00	100 %	25.080.215.788,90	100 %	27.424.673.406,79	100 %	73.618.140.394,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			000X 00.X X X X 0 1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Dinas pada UPT WS Jeneberang Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Dinas pada UPT WS Sardinang	12	0 Bln	-	0 Bln	-	12 Bln	1.902.786.487,00	12 Bln	2.093.065.149,70	12 Bln	2.302.371.649,27	12 Bln	6.298.223.285,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan																OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT WS Ieneherang	167	0 Orang		0 Orang		167 Orang		167 Orang		167 Orang		167 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT WS Tersebut	70	0 Orang		0 Orang		0 Orang		70 Orang		70 Orang		70 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT WS Tersebut	95	0 Orang		0 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang		95 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT WS Tersebut	60	0 Orang		0 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT WS Tersebut	15	0 Orang		0 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT Workshop dan Peralatan	18	0 Orang		0 Orang		18 Orang		18 Orang		18 Orang		18 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT Laboratorium dan Penjualan	35	0 Orang		0 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang							
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT Wil.	13	0 Orang		0 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada IPT Wil.	28	0 Orang		0 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang			
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada UPT Wil.	18	0 Orang		0 Orang		18 Orang		18 Orang		18 Orang		18 Orang			
								Tersedianya Jumlah dan dokumen tenaga Non-ASN secara selektif, efisien dan optimal pada IPT Wil.	25	0 Orang		0 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang		25 Orang			
			0	0	X . X . 0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100	100 %	-	100 %	-	100 %	4.763.551.000,00	100 %	6.564.770.200,00	100 %	7.221.247.220,00	100 %	18.549.568.420,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X . 0 1	1.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5	0 Unit	-	0 Unit	-	10 Unit	4.001.937.500,00	10 Unit	4.402.131.250,00	10 Unit	4.842.344.375,00	10 Unit	13.246.413.125,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			0	0	X . X . 0 1	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara Pada UPT Laboratorium dan Penguilan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara Pada UPT Workshop dan	0	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	709.565.500,00	10 Unit	1.050.386.150,00	10 Unit	1.155.424.765,00	10 Unit	2.915.376.415,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
									1	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
									1	0 Unit		0 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Persentase pengelolaan Sungai / Danau / Waduk kewenangan Provinsi WS Saddane	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
								Persentase pengelolaan Sungai / Danau / Waduk kewenangan Provinsi WS Walanae	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
								Cenranae Persentase pengelolaan Sungai / Danau / Waduk kewenangan Provinsi WS Pompengan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
								Larona Persentase pengujian paket pekerjaan SDA yang		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			1	0	1	1.0	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	3 Dok	1.000.000.000,00	3 Dok	1.000.000.000,00	6 Dok	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir Lahar Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang di	21	0 Dok	-	0 Dok	-	16 Dok	967.958.000,00	10 Dok	1.000.000.000,00	10 Dok	1.000.000.000,00	36 Dok	2.967.958.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang di		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.000.000.000,00	0 Dok	-	1 Dok	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	06	Pembanguna Embung dan penampung air terbangun	1	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	2.288.214.900,00	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	2.288.214.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	09	Pembanguna Tanggul Sungai		0 Sungai	-	0 Sungai	-	5 Sungai	4.829.251.500,00	20 Sungai	4.000.000.000,00	20 Sungai	4.000.000.000,00	45 Sungai	12.829.251.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	10	Pembanguna Bangunan Perkuatan Tebing		0 Sungai	-	0 Sungai	-	0 Sungai	-	5 Sungai	1.000.000.000,00	5 Sungai	1.000.000.000,00	10 Sungai	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			1 0 3	1 . 0	1.0 1	16	Pembanguna n Check Dam	Jumlah Check dam terbangun (Unit)			0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	1.000.000.000,00	5 Unit	1.000.000.000,00	5 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3	1.0 1	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai direhabilitasi (Sungai)			0 Sungai	-	0 Sungai	-	5 Sungai	1.404.280.000,00	5 Sungai	1.000.000.000,00	5 Sungai	1.000.000.000,00	15 Sungai	3.404.280.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3	1.0 1	46	NormalisasiR estorasi Sungai	Jumlah sungai yang normalisasi/res torasi (Sungai)			0 Sungai	-	0 Sungai	-	18 Sungai	4.872.169.000,00	20 Sungai	5.000.000.000,00	20 Sungai	5.000.000.000,00	58 Sungai	14.872.169.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 1	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada WS Jeneberane Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada WS Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada WS Pomoenean Jumlah embung dan penampung air terpelihara pada WS Walanape			0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	68.868.500,00	0 Unit	16.176.300,00	0 Unit	16.985.115,00	1 Unit	102.029.915,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3	1.0 1	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan	Jumlah stasiun hidrologi yang beroperasi (Unit)			0 Unit	-	0 Unit	-	153 Unit	252.822.000,00	153 Unit	265.463.100,00	153 Unit	278.736.255,00	153 Unit	797.021.355,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 1	61	Pembinaan dan Pemberdayaa n Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Jumlah jaringan informasi Sumber Daya Air (Jaringan Informasi)			0 Jaringan Informasi	-	0 Jaringan Informasi	-	40 Jaringan Informasi	81.447.600,00	40 Jaringan Informasi	85.519.980,00	40 Jaringan Informasi	89.795.979,00	40 Jaringan Informasi	256.763.559,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 1	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sumber Daya Air (Lembaga) Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian lab dan material guna kendali dan mutu pekerjaan pada bidang pengelolaan	100		0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	24 Lembaga	158.955.000,00	24 Lembaga	166.902.750,00	24 Lembaga	-	24 Lembaga	325.857.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 1	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai & danau pada WS Jeneberane			0 WS	-	0 WS	-	50 WS	145.240.400,00	50 WS	152.502.420,00	50 WS	160.127.541,00	50 WS	457.870.361,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan danau pada WS Pompegan Larona (WS)		0 WS		0 WS		50 WS		50 WS		50 WS		50 WS				
								Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan danau pada WS Walanae (WS)		0 WS		0 WS		50 WS		50 WS		50 WS		50 WS				
								Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan danau pada WS Saddang (WS)		0 WS		0 WS		50 WS		50 WS		50 WS		50 WS				
			1	03	103002	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah KabupatenKotabaru		0	-	0	-	0	-	0	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	03	103003	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	1000 Meter	2.000.000.000,00	1000 Meter	2.000.000.000,00	2000 Meter	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	03	103004	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi		0 Ha	-	0 Ha	-	0 Ha	-	0 Ha	-	0 Ha	-	0 Ha	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	03	103002	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah KabupatenKotabaru	17594	17594 m	-	348152 m	-	354085 m	116.921.055.067,00	360982 m	74.264.821.086,26	367880 m	70.717.428.678,75	367880 m	261.903.304.832,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
								Pada DI Kewenangan Provinsi di WS Jeneberang Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi di WS Saddang	12160	12160 ha		17594 ha		17594 ha		17594 ha		17594 ha		17594 ha				
								Pada DI Kewenangan Provinsi di WS Saddang				12160 ha		12160 ha		12160 ha		12160 ha		12160 ha				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan																OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
											(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
								Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi di WS Walanae Cenranae Cakupan layanan Irigasi pada DI Kewenangan Provinsi di WS Pompengan Larona	17894	17894 ha		17894 ha		17894 ha		17894 ha		17894 ha		17894 ha							
									11210	11210 ha		11210 ha		11210 ha		11210 ha		11210 ha		11210 ha							
			1	0	1	1.0	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	3	0 Dok	-	0 Dok	-	16 Dok	3.472.021.421,00	20 Dok	3.000.000.000,00	20 Dok	3.000.000.000,00	56 Dok	9.472.021.421,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
			1	0	1	1.0	05	Pembanguna n Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak terbangun		0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	1000 Meter	2.000.000.000,00	1000 Meter	2.000.000.000,00	0 Meter	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
			1	0	1	1.0	07	Pembanguna n Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah jaringan irigasi air tanah yang dikembangkan (unit)		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
			1	0	1	1.0	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan direhabilitasi (Meter)		0 Meter	-	0 Meter	-	70000 Meter	70.415.725.240,00	46000 Meter	53.289.791.003,26	55000 Meter	55.000.000.000,00	171000 Meter	178.705.516.243,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
			1	0	1	1.0	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi direhabilitasi (Unit)	1	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	5.000.000.000,00	0 Unit	-	1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
			1	0	1	1.0	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Jumlah lokasi DI Tambak kewenangan Provinsi yang di rehabilitasi (Lokasi)		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	6.508.259.500,00	2 Lokasi	5.000.000.000,00	2 Lokasi	5.000.000.000,00	6 Lokasi	16.508.259.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
			1	0	1	1.0	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara (Meter)	350000	0 Meter	-	0 Meter	-	350000 Meter	35.738.468.856,00	400000 Meter	4.976.832.408,00	400000 Meter	4.716.523.738,75	400000 Meter	45.431.825.002,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
									Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae	67465	0 Meter		0 Meter		67465 Meter		67465 Meter		67465 Meter		67465 Meter						
									Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae	129.372	0 Meter		0 Meter		129.37 Meter		129.37 Meter		129.37 Meter		129.37 Meter						
									Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae	86121	0 Meter		0 Meter		86121 Meter		86121 Meter		86121 Meter		86121 Meter						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
						Panjang jaringan irigasi permukaan yang beroperasi pada DI Provinsi di WS	156767	0 Meter		0 Meter		156767 Meter		156767 Meter		156767 Meter		156767 Meter					
			1	0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 2	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jumlah bendung irigasi yang beroperasi pada DI Provinsi di WS		0 Unit	-	0 Unit	-	25 Unit	285.733.050,00	25 Unit	301.935.850,00	25 Unit	269.958.465,00	25 Unit	857.627.365,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 2	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Jeneberanz Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Pomoenzan Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS Walanae Panjang jaringan irigasi tambak yang beroperasi pada DI Provinsi di WS		0 Meter	-	0 Meter	-	163215 Meter	59.892.000,00	163215 Meter	96.636.750,00	163215 Meter	101.468.587,50	163215 Meter	257.997.337,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 0 2	1.0 2	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina (Kelompok) Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina pada UPT WS Pompengan Jaropa		0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	2 Kelompok	440.955.000,00	2 Kelompok	599.625.075,00	2 Kelompok	629.477.887,50	2 Kelompok	1.670.057.962,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina pada UPT WS Walanae Cenranae Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina pada UPT WS Saddane Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang dibina pada UPT WS Jeneberang		0 Kelompok		0 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		
										0 Kelompok		0 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		
										0 Kelompok		0 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	% Penduduk berakses air minum layak	1	03	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM) Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/kota	74%	74.08 %	-	78.74 %	-	82.47 %	160.619.100,00	86.28 %	25.014.213.853,00	89.62 %	25.933.279.234,00	89.62 %	51.108.112.187,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		% Penduduk berakses air minum layak							100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			1	03	1.03.03		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Lintas KabupatenKota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota (SPAM) Jumlah kab/kota yang dibina	0	0 %	-	0 %	-	0 %	160.619.100,00	0 %	25.014.213.853,00	100 %	25.933.279.234,00	100 %	51.108.112.187,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	03	1.03.03	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota (Dok)		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	1.000.000.000,00	2 Dok	1.000.000.000,00	4 Dok	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	03	1.03.03	02	Supervisi PembangunanPeningkatan PerluasanPerbaikan SPAM	Pengendalian pelaksanaan konstruksi SPAM yang dibangun, di tingkatkan, di perluas, & di perbaiki secara optimal pada kewenangan		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	900.000.000,00	1 Lokasi	940.000.000,00	2 Lokasi	1.840.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1 0 3 . 0 3 . 0 3	1.0 1	03	Pembanguna n Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri di wilayah kewenangan provinsi (Ltr/Dtk)		0 Ltr/Dtk	-	0 Ltr/Dtk	-	0 Ltr/Dtk	-	1000 Ltr/Dtk	22.500.000.000,00	1100 Ltr/Dtk	23.500.000.000,00	1 Ltr/Dtk	46.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0 3	1.0 1	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas KabupatenKo ta	Jumlah kerjasama penyelenggara an SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya		0 Kerjasama	-	0 Kerjasama	-	0 Kerjasama	-	1 Kerjasama	140.000.000,00	1 Kerjasama	140.000.000,00	2 Kerjasama	280.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0 3	1.0 1	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Cakupan pembinaan Teknis SDM & kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi (Kab./Kota)		0 Kab./Kota	-	0 Kab./Kota	-	24 Kab./Kota	160.619.100,00	24 Kab./Kota	274.213.853,00	24 Kab./Kota	274.213.853,00	24 Kab./Kota	709.046.806,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0 3	1.0 1	12	Pembentukana Organisasi Pengelola SPAM Lintas KabupatenKo ta	Jumlah Organisasi, BUMD dan atau UPTD provinsi mengelola SPAM lintas Kab./Kota di		0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	1 Lembaga	200.000.000,00	1 Lembaga	79.065.381,00	2 Lembaga	279.065.381,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	% Penduduk berakses layanan air limbah domestic	1 03 1.03 0 4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	160.955.500,00	100 %	1.000.000.000,00	100 %	45.415.267.958,00	100 %	46.576.223.458,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0 4	1.0 1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Regional yang dikembangkan Jumlah Kab/Kota yang dibina	24	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	160.955.500,00	0 unit	1.000.000.000,00	1 unit	45.415.267.958,00	1 unit	46.576.223.458,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0 4	1.0 1	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPATPSTSPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan TPA Regional (Dok)		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	700.000.000,00	0 Dok	-	1 Dok	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3	1.0 1	03	Pembangunan TPATPSTSPA Kewenangan	Jumlah TPA/TPST/SPA terbangun (Lokasi)		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	40.000.000.000,00	1 Lokasi	40.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3	1.0 1	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan tersedia (Unit)		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	5.000.000.000,00	1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1 0 3 . 0 3 . 0	1.0 1	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas KabupatenKo ta	Jumlah fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kab./Kota (Fasilitasi)		0 Fasilitasi	-	0 Fasilitasi	-	0 Fasilitasi	-	1 Fasilitasi	100.000.000,00	2 Fasilitasi	215.267.958,00	3 Fasilitasi	315.267.958,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
										Target (18)	Rp (19)	Target (110)	Rp (111)	Target (112)	Rp (113)	Target (114)	Rp (115)	Target (116)	Rp (117)	Target (118)	Rp (119)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1	03	1.03.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Cakupan pembinaan teknis & pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastuktur persampahan (Kab.Kota)		0 Kab.Kota	-	0 Kab.Kota	-	24 Kab.Kota	160.955.500,00	24 Kab.Kota	200.000.000,00	24 Kab.Kota	200.000.000,00	24 Kab.Kota	560.955.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	% Penduduk berakses layanan air limbah domestic	1	03	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (CDM)	77.97%	77.97 %	-	85.03 %	-	87.8 %	160.961.000,00	91.02 %	450.000.000,00	93.55 %	450.000.000,00	93.55 %	1.060.961.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		% Penduduk berakses layanan air limbah domestic						Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			1	03	1.03.05		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Rezional Jumlah kab/kota yang dibina	24	0 %	-	0 %	-	0 %	160.961.000,00	0 %	450.000.000,00	0 %	450.000.000,00	0 %	1.060.961.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	03	1.03.05	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusnya dokumen rencana kebijakan strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (Dok)		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	150.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	2 Dok	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	03	1.03.05	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan pembinaan SDM (laki-Laki dan Perempuan) dan kelembagaan pengelola air		0 Kab./Kota	-	0 Kab./Kota	-	24 Kab./Kota	160.961.000,00	24 Kab./Kota	200.000.000,00	24 Kab./Kota	200.000.000,00	24 Kab./Kota	560.961.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	03	1.03.05	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota		0 Kab./Kota	-	0 Kab./Kota	-	0 Kab./Kota	-	3 Kab./Kota	100.000.000,00	3 Kab./Kota	100.000.000,00	6 Kab./Kota	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatkan layanan infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan sumber daya air	% Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	1	03	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	0%	0 %	-	0 %	-	0 %	-	16 %	1.700.000.000,00	16 %	550.000.000,00	16 %	2.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1031.003.006		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah KabupatenKota dan	Jumlah lokasi sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan	0	0 kab/kota	-	1 kab/kota	-	1 kab/kota	-	1 kab/kota	1.700.000.000,00	1 kab/kota	550.000.000,00	1 kab/kota	2.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			1031.003.006		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan kebijakan strategi dan teknis sistem drainase		0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	1.200.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	3 Dok	1.250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			1031.003.006		Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah lokasi drainase perkotaan dan sarana pendukungnya pada kewenangan provinsi terbagun (lokasi)		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	2 Lokasi	500.000.000,00	2 Lokasi	500.000.000,00	4 Lokasi	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	% Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	1031.008		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintah Yang di	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	164.181.164.792,00	100 %	101.501.919.632,00	100 %	102.450.000.000,00	100 %	368.133.084.424,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			1031.003.008		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah lokasi bangunan gedung yang difasilitasi Persentase ketersediaan layanan teknis bangunan gedung Persentase pengujian paket pekerjaan bangunan gedung yang	0	0 lokasi	-	3 lokasi	-	7 lokasi	164.181.164.792,00	7 lokasi	101.501.919.632,00	7 lokasi	102.450.000.000,00	21 lokasi	368.133.084.424,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
							100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
							100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
			1031.003.008		Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis	10	0 Dok	-	0 Dok	-	20 Dok	163.763.389.992,00	5 Dok	99.001.919.632,00	5 Dok	100.000.000.000,00	30 Dok	362.765.309.624,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			1031.003.008		Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan strategis provinsi yang di rehabilitasi renovasi dan ubahsui bangunan gedung (Gedung/Bangu		0 Gedung/Bangunan	-	0 Gedung/Bangunan	-	0 Gedung/Bangunan	-	1 Gedung/Bangunan	2.000.000.000,00	1 Gedung/Bangunan	2.000.000.000,00	2 Gedung/Bangunan	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			103.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi (Dok) Jumlah pelaksanaan pendampingan bantuan teknis pembangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi dalam pengujian kendali mutu, dan material		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	348.902.800,00	1 Dok	350.000.000,00	1 Dok	300.000.000,00	3 Dok	998.902.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			103.01.05	Identifikasi Penetapan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah	Jumlah identifikasi bangunan gedung cagar budaya yang sangat penting dilestarikan milik pemerintah Provinsi (Lan)		0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	50.000.000,00	1 Lap	50.000.000,00	2 Lap	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			103.01.09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor HDNo Bangunan Gedung Negara	Persentase layanan HDNo Bangunan Gedung Negara ter registrasi (%)		0 %	-	0 %	-	100 %	68.872.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	168.872.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			103.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase layanan pengelolaan rumah negara (%)		0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	% kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan	103.01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan	0	5 Kawasan	-	7 Kawasan	-	11 Kawasan	89.841.340.549,00	13 Kawasan	109.353.237.501,00	15 Kawasan	109.404.185.674,00	15 Kawasan	308.598.763.724,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			103.01.03.09	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Kota/ Kabupaten	Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Persentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis	0 100	2 lokasi 100 %	- 100 %	2 lokasi 100 %	- 100 %	2 lokasi 100 %	89.841.340.549,00	2 lokasi 100 %	109.353.237.501,00	2 lokasi 100 %	109.404.185.674,00	10 lokasi 100 %	308.598.763.724,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1031.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	2	0 Dok	-	0 Dok	-	13 Dok	8.867.546.169,00	2 Dok	5.000.000.000,00	2 Dok	5.000.000.000,00	17 Dok	18.867.546.169,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.02	Supervisi PenataanPembelliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi penataan/pembelliharaan bangunan dan lingkungan yang disupervisi		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	16 Lokasi	7.912.425.655,00	2 Lokasi	4.000.000.000,00	2 Lokasi	4.000.000.000,00	20 Lokasi	15.912.425.655,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Rest Area / Stop Area Terbangun	2	0 Rest Area	-	0 Rest Area	-	1 Rest Area	72.859.423.125,00	2 Rest Area	100.000.000.000,00	2 Rest Area	99.999.999.999,00	5 Rest Area	272.859.423.124,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.09		Jumlah Kawasan Strategis dikembangkan	2	0 Kawasan	-	0 Kawasan	-	3 Kawasan		1 Kawasan		1 Kawasan		5 Kawasan				
			1031.07	Monitoring PenataanPembelliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi bangunan dan lingkungan yang di lakukan penataan/pembelliharaan terpantau (Lokasi) % Monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan bangunan dan lingkungan yang dilakukan pengujian lab (%)		0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	16 Lokasi	201.945.600,00	5 Lokasi	353.237.501,00	5 Lokasi	404.185.675,00	26 Lokasi	959.368.776,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya akses dan kemandapan jalan provinsi	% penanganan ruas jalan terisolir Rasio kemandapan jalan provinsi	1031.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda	58 20.48%	61.52 % 20.48 %	-	65.9 % 42.72 %	-	72.3 % 71.79 %	238.283.321.152,00	74.24 % 74.25 %	229.124.506.350,54	75.09 % 80 %	187.201.679.087,46	75.09 % 80 %	654.609.506.590,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.03	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				-		-		-		-		-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.03	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya pelebaran jembatan di wilayah kewenangan Provinsi		0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.03	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang penanganan ruas jalan Persentase ketersediaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan	100	439 km 100 %	-	275 km 100 %	-	59 km 100 %	238.283.321.152,00	81 km 100 %	229.124.506.350,54	17 km 100 %	187.201.679.087,46	871 km 100 %	654.609.506.590,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Panjang ruas jalan wilayah I yang ditangani Panjang ruas jalan wilayah II yang ditangani Panjang ruas jalan wilayah III yang ditangani Panjang ruas jalan wilayah IV yang ditangani Panjang ruas jalan wilayah V yang ditangani Panjang ruas jalan wilayah VI yang ditangani Persentase layanan ketersediaan bahan dan peralatan untuk penenanaan Persentase pengujian paket pekerjaan jalan yang			267 km		267 km		267 km		267 km		267 km		267 km			
										315.86 km		315.86 km		315.86 km		315.86 km		315.86 km		315.86 km				
										193.42 km		193.42 km		193.42 km		193.42 km		193.42 km		193.42 km				
										448.76 km		448.76 km		448.76 km		448.76 km		448.76 km		448.76 km				
										398.35 km		398.35 km		398.35 km		398.35 km		398.35 km		398.35 km				
										283.41 km		283.41 km		283.41 km		283.41 km		283.41 km		283.41 km				
									100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
									100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			1	0	1	1.0	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaran Jalan dan jembatan	31	0 Dok	-	0 Dok	-	5 Dok	2.196.248.300,00	2 Dok	1.000.000.000,00	2 Dok	1.000.000.000,00	9 Dok	4.196.248.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	02	Pembebasan LahanTanah untuk Penyelenggaran Jalan	50	0 %	-	0 %	-	100 %	1.458.401.705,00	100 %	1.000.000.000,00	100 %	1.000.000.000,00	100 %	3.458.401.705,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	03	Pengelolaan Leger Jalan	12	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	79.978.800,00	1 Dok	79.978.800,00	1 Dok	79.978.800,00	3 Dok	239.936.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1	0	1	1.0	04	Survey Kondisi JalanJembatan		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	1.296.435.800,00	1 Dok	867.720.300,00	1 Dok	867.720.300,00	3 Dok	3.031.876.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
								Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah VI Jumlah dokumen data jalan dan jembatan kewenangan Provinsi vane		0 Dok		0 Dok		1 Dok		0 Dok		0 Dok		1 Dok				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah I yang Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah II yang Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah III Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah IV Jumlah dokumen data jalan dan jembatan Wilayah V yang		0 Dok		0 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		3 Dok				
									124.9	0 Km	-	0 Km	-	70.96 Km	40.823.991.000,00	17 Km	127.809.110.000,00	17 Km	125.500.000.000,00	104.96 Km	294.133.101.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Km	-	0 Km	-	0 Km	39.620.500,00	0 Km	5.000.000.000,00	3 Km	21.000.000.000,00	3 Km	26.039.620.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Km	-	0 Km	-	0 Km	13.450.500,00	0 Km	2.000.000.000,00	0 Km	-	0 Km	2.013.450.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Km	-	0 Km	-	53.5 Km	125.757.752.150,00	65 Km	54.431.000.000,00	0 Km	-	118.5 Km	180.188.752.150,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Km	-	0 Km	-	276.18 Km	14.317.486.797,00	276.41 Km	15.033.361.136,85	276.41 Km	15.785.029.193,71	276.41 Km	45.135.877.127,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
									116	0 Km		0 Km		269.07 Km		273.07 Km		273.07 Km		273.07 Km				
									130.43	0 Km		0 Km		301.96 Km		246.86 Km		246.86 Km		246.86 Km				
										0 Km		0 Km		211.1 Km		205.1 Km		205.1 Km		205.1 Km				
									64	0 Km		0 Km		448.56 Km		445.76 Km		445.76 Km		445.76 Km				
									162.96	0 Km		0 Km		420.31 Km		405.9 Km		405.9 Km		405.9 Km				
										0 Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	28.481.441.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	28.481.441.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
										0 Meter	-	0 Meter	-	0 Meter	-	39 Meter	1.503.336.113,69	43 Meter	1.568.950.793,75	43 Meter	3.072.286.907,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					10			Jumlah jembatan pada wilayah UPT III dipelihara (Meter)		0 Meter		0 Meter		0 Meter		32 Meter		32 Meter		32 Meter			
								Jumlah jembatan pada wilayah UPT II dipelihara (Meter)		0 Meter		0 Meter		0 Meter		32 Meter		35 Meter		35 Meter			
							1072.6	Jumlah jembatan pada wilayah UPT VI dipelihara (Meter)		0 Meter		0 Meter		0 Meter		36 Meter		40 Meter		76 Meter			
								Jumlah jembatan pada wilayah UPT V dipelihara (Meter)		0 Meter		0 Meter		0 Meter		51 Meter		65 Meter		116 Meter			
							379.7	Jumlah jembatan pada wilayah UPT IV dipelihara (Meter)		0 Meter		0 Meter		0 Meter		52 Meter		52 Meter		104 Meter			
			103	103	1.01	21	Penanggulang an BencanaTang gap Darurat	% ketersediaan bahan untuk penanganan bencana/tangg ap darurat (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	12.355.964.000,00	100 %	10.000.000.000,00	100 %	10.000.000.000,00	100 %	32.355.964.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			103	103	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggar aan JalanJembata n	Cakupan pelaksanaan pekerjaan terpantau dan dievaluasi Penyelenggaraa n Jalan/Jembatan (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	1.522.434.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	2.322.434.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
								Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pengujian Penyelenggaraa n Jalan/Jembatan oleh UPT Laboratorium dan Pengujian (%)	100	0 %		0 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
			103	103	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggar aan JalanJembata n	Cakupan pelaksanaan pekerjaan yang disupervisi (%)	100	0 %	-	0 %	-	100 %	9.940.116.600,00	100 %	10.000.000.000,00	100 %	10.000.000.000,00	100 %	29.940.116.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	% Pelaksanaan layanan jasa konstruksi	103	103	1.03.11		PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan	30%	30 %	-	40 %	-	50 %	999.859.900,00	60 %	1.530.545.240,00	70 %	1.582.072.502,00	70 %	4.112.477.642,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			103	103	1.01		Penyelenggar aan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah		250 orang	-	250 orang	-	250 orang	553.476.300,00	250 orang	630.545.240,00	250 orang	662.072.502,00	1250 orang	1.846.094.042,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			103	103	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggar aan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya dokumen SOP penyelenggara an Pelatihan tenaga ahli konstruksi		0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	132.447.900,00	1 Dok	188.465.420,00	1 Dok	197.888.691,00	3 Dok	518.802.011,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			1	0 3	1 . 0 3 .	1.0 1	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi yang di laksanakan		0 Kali	-	0 Kali	-	4 Kali	421.028.400,00	4 Kali	442.079.820,00	4 Kali	464.183.811,00	12 Kali	1.327.292.031,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1 1	1.0 2		Penyelenggar aan Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan terselenggaraan ya Sistem Informasi Jasa Konstruksi provinsi yang aktif dengan data termutakhir	80	100 %	-	100 %	-	100 %	122.070.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	420.000.000,00	100 %	942.070.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1 1	1.0 2	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN		0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	50 Jenis	200.000.000,00	50 Jenis	210.000.000,00	100 Jenis	410.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1 1	1.0 2	03	Penyelenggar aan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI (Kali)		0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	122.070.000,00	1 Kali	200.000.000,00	1 Kali	210.000.000,00	3 Kali	532.070.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1	1.0 3		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggar aan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik	100	100 %	-	100 %	-	100 %	324.313.600,00	100 %	500.000.000,00	100 %	500.000.000,00	100 %	1.324.313.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1 1	1.0 3	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Pengelenggar aan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah hasil pengawasan ketidaksesuaia n jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan dan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintahan		0 Keg	-	0 Keg	-	24 Keg	324.313.600,00	24 Keg	500.000.000,00	24 Keg	500.000.000,00	72 Keg	1.324.313.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan ketaatan pemanfaatan ruang	% Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	1	03	1.03.1 2			PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	0.5	0.6	-	0.7	-	0.8	1.773.375.800,00	0.9	5.001.420.000,00	1	4.651.400.000,00	1	11.426.195.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1	1.0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata	Jumlah Dokumen RTRW/RTR yang disusun/ ditetapkan	0	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	673.325.600,00	4 Dok	2.850.000.000,00	4 Dok	2.850.000.000,00	4 Dok	6.373.325.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0 3	1 . 0 3 . 1 2	1.0 1	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah materi teknis RRTR provinsi yang di evaluasi, disetujui untuk mendapat penetapan	1	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	455.965.000,00	4 Dok	2.000.000.000,00	4 Dok	2.000.000.000,00	9 Dok	4.455.965.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1031.003	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2	0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	119.851.600,00	2 Dok	750.000.000,00	2 Dok	750.000.000,00	5 Dok	1.619.851.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.002	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUn dangan Bidang Penataan Ruang	2	0 Kab./Kota	-	0 Kab./Kota	-	24 Kab./Kota	97.509.000,00	24 Kab./Kota	100.000.000,00	24 Kab./Kota	100.000.000,00	24 Kab./Kota	297.509.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.00303		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	100	100 %	-	100 %	-	100 %	320.513.500,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	520.513.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.002	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR KabupatenKo	2	0 Dok	-	0 Dok	-	2 Dok	320.513.500,00	4 Dok	100.000.000,00	4 Dok	100.000.000,00	10 Dok	520.513.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.00303		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan		0	-	0	-	0	-	0	350.000.000,00	0	-	0	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.00303	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan		0 Dok.	-	0 Dok.	-	0 Dok.	-	1 Dok.	350.000.000,00	0 Dok.	-	0 Dok.	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100	100 %	-	100 %	-	100 %	326.499.700,00	100 %	800.000.000,00	100 %	800.000.000,00	0 %	1.926.499.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.003	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembanguna	24	0 Kab/Kota	-	0 Kab/Kota	-	24 Kab/Kota	129.578.100,00	24 Kab/Kota	350.000.000,00	24 Kab/Kota	350.000.000,00	24 Kab/Kota	829.578.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.003	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100	0 %	-	0 %	-	100 %	196.921.600,00	100 %	450.000.000,00	100 %	450.000.000,00	100 %	1.096.921.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.004		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	100 %	-	100 %	-	100 %	453.037.000,00	100 %	901.420.000,00	100 %	901.400.000,00	100 %	2.255.857.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
			1031.0031.004	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum	4	0 Kab/Kota	-	0 Kab/Kota	-	5 Kab/Kota	290.248.700,00	10 Kab/Kota	451.420.000,00	10 Kab/Kota	451.400.000,00	25 Kab/Kota	1.193.068.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
								(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1	0	1	1.0	03	Operasionalis asi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS (Laki-Laki & Perempuan) yang melaksanakan operasional dan tugas pada bidang nenataan ruang		0 Orang	-	0 Orang	-	33 Orang	57.136.600,00	33 Orang	200.000.000,00	33 Orang	200.000.000,00	33 Orang	457.136.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			1	0	1	1.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Kab/Kota)	24	0 Kab/Kota	-	0 Kab/Kota	-	24 Kab/Kota	105.651.700,00	24 Kab/Kota	250.000.000,00	24 Kab/Kota	250.000.000,00	24 Kab/Kota	605.651.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Grandtotal											-		-	731.789.334.552,00		688.048.299.855,00		706.623.829.116,00		2.126.461.463.523,00			

Lampiran 4

**REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER-PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.178.743.392,0	81.766.093.499,0	93.79	99.40
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.280.730.260,0	1.457.778.312,0	63.92	95.86
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.773.860,0	203.954.066,0	65.42	96.42
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	287.591.600,0	173.396.560,0	60.29	96.24
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	51.996.500,0	44.705.000,0	85.98	100.00
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	196.426.800,0	115.236.200,0	58.67	100.00
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	78.310.000,0	25.880.000,0	33.05	38.68
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.079.733.700,0	782.737.186,0	72.49	97.73
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.897.800,0	111.869.300,0	40.69	100.00
		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.665.072.725,0	60.205.795.427,0	99.24	99.99
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.624.067.525,0	59.305.127.426,0	99.47	100.00
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167.589.000,0	166.627.000,0	99.43	100.00
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.182.700,0	22.182.700,0	100.00	100.00
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.818.000,0	13.468.500,0	75.59	75.75
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.233.000,0	14.174.000,0	70.05	100.00
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	794.438.400,0	667.851.701,0	84.07	99.92
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.744.100,0	16.364.100,0	87.30	100.00

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	343.424.600,0	255.031.400,0	74.26	99.16
		1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	280.351.800,0	208.499.100,0	74.37	99.57
		2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.072.800,0	46.532.300,0	73.78	97.35
		1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	199.229.100,0	148.295.640,0	74.43	100.00
		1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.410.500,0	4.930.000,0	30.04	100.00
		2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				
		3 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	182.818.600,0	143.365.640,0	78.42	100.00
		1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.676.900,0	82.251.500,0	79.33	84.49
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
		2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.122.300,0	40.949.900,0	90.75	91.00
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.044.300,0	6.075.300,0	60.49	61.67
		4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.750.300,0	34.966.300,0	85.81	98.35
		5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	260.000,0	260.000,0	100.00	100.00
		6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,0			
		1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.384.555.165,0	1.476.507.068,0	61.92	91.70
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.530.600,0	79.707.300,0	90.03	99.91
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	477.271.570,0	475.569.570,0	99.64	100.00
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	215.460.480,0	111.408.680,0	51.71	62.38
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.025.750,0	72.451.600,0	69.65	84.19
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.800.000,0			
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.396.207.165,0	734.986.618,0	52.64	99.81

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	59.755.300,0	2.383.300,0	3.99	8.86
		8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	32.504.300,0			
		1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.964.500,0			
		1 Pengadaan Mebel	188.204.500,0			
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.760.000,0			
		1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.282.526.742,0	15.587.865.815,0	90.19	99.96
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.873.433.742,0	1.266.122.815,0	67.58	99.60
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.409.093.000,0	14.321.743.000,0	92.94	100.00
		1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.721.563.400,0	2.552.568.337,0	68.59	99.94
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	2.907.971.400,0	1.946.787.264,0	66.95	100.00
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27.612.500,0	14.421.363,0	52.23	100.00
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	633.931.500,0	491.359.710,0	77.51	100.00
		4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	152.048.000,0	100.000.000,0	65.77	98.65
		2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	190.143.543.573,0	170.480.792.689,0	89.66	95.86
		2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.605.569.112,0	13.706.876.027,0	93.85	98.25
		1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	3.432.789.360,0	2.980.453.671,0	86.82	100.00
		2 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	963.209.961,0	961.363.061,0	99.81	99.97
		3 Pembangunan Tanggul Sungai	19.341.500,0	1.481.500,0	7.66	8.00
		4 Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.638.554.233,0	1.638.554.233,0	100.00	100.00
		5 Normalisasi/Restorasi Sungai	7.893.234.958,0	7.584.309.312,0	96.09	97.00
		6 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan				

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		7 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	14.892.500,0	14.085.000,0	94.58	100.00
		8 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	252.822.000,0	249.936.200,0	98.86	100.00
		9 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	81.447.600,0	48.042.300,0	58.99	100.00
		10 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	172.155.000,0	105.415.000,0	61.23	100.00
		11 Operasi dan Pemeliharaan Danau	7.333.000,0	6.928.000,0	94.48	100.00
		12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	129.789.000,0	116.307.750,0	89.61	100.00
		2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.537.974.461,0	156.773.916.662,0	89.31	95.66
		1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	8.681.684.599,0	7.163.585.392,0	82.51	88.00
		2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	163.095.784.272,0	146.070.275.566,0	89.56	96.00
		3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	11.940.000,0	9.835.000,0	82.37	100.00
		4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.282.367.090,0	3.144.948.954,0	95.81	99.00
		5 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	193.191.500,0	170.761.250,0	88.39	99.00
		6 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	29.782.000,0	8.757.000,0	29.40	35.00
		7 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	243.225.000,0	205.753.500,0	84.59	100.00
		3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	115.527.100,0	102.723.200,0	88.92	100.00
		3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	115.527.100,0	102.723.200,0	88.92	100.00
		1 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	115.527.100,0	102.723.200,0	88.92	100.00

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	102.805.500,0	97.467.000,0	94.81	100.00
		4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	102.805.500,0	97.467.000,0	94.81	100.00
		1 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	102.805.500,0	97.467.000,0	94.81	100.00
		5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	106.541.500,0	78.161.000,0	73.36	100.00
		5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	106.541.500,0	78.161.000,0	73.36	100.00
		1 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	106.541.500,0	78.161.000,0	73.36	100.00
		6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	113.003.354.905,0	106.792.390.587,0	94.50	94.98
		6.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	113.003.354.905,0	106.792.390.587,0	94.50	94.98
		1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	112.714.140.105,0	106.740.606.887,0	94.70	94.97
		2 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	287.992.800,0	50.636.700,0	17.58	99.00
		3 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	1.222.000,0	1.147.000,0	93.86	100.00

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	31.611.896.607,0	28.276.454.655,0	89.45	93.29
		7.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	31.611.896.607,0	28.276.454.655,0	89.45	93.29
		1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.095.092.940,0	3.515.905.242,0	85.86	97.00
		2 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5.641.887.027,0	4.447.251.003,0	78.83	91.00
		3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	21.746.735.540,0	20.228.653.110,0	93.02	93.14
		4 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	128.181.100,0	84.645.300,0	66.04	100.00
		8 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	690.106.475.266,0	644.681.224.184,0	93.42	98.25
		8.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	690.106.475.266,0	644.681.224.184,0	93.42	98.25
		1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	16.901.280.895,0	16.628.740.380,0	98.39	99.41
		2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	520.000.955,0	178.106.632,0	34.25	100.00
		3 Pengelolaan Leger Jalan	43.737.500,0			
		4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	604.881.800,0	428.898.440,0	70.91	100.00
		5 Pembangunan Jalan	364.709.789.849,0	345.410.161.493,0	94.71	100.00
		6 Pelebaran Jalan Menuju Standar	94.975.884.787,0	92.245.620.733,0	97.13	100.00
		7 Rekonstruksi Jalan				
		8 Rehabilitasi Jalan	138.307.006.968,0	133.337.994.064,0	96.41	97.83
		9 Pemeliharaan Rutin Jalan	15.563.824.818,0	13.767.929.496,0	88.46	98.24
		10 Pembangunan Jembatan	25.268.119.115,0	15.195.353.892,0	60.14	68.00
		11 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	6.479.162.000,0	5.246.873.640,0	80.98	100.00

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		12 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.144.936.972,0	954.215.345,0	83.34	100.00
		13 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	25.587.849.607,0	21.287.330.069,0	83.19	97.69
		9 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	880.355.900,0	689.244.392,0	78.29	95.71
		9.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	494.597.300,0	342.771.580,0	69.30	92.36
		1 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	122.367.900,0	24.477.900,0	20.00	69.11
		2 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	372.229.400,0	318.293.680,0	85.51	100.00
		9.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	122.070.000,0	98.720.000,0	80.87	100.00
		1 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	122.070.000,0	98.720.000,0	80.87	100.00
		9.3 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	263.688.600,0	247.752.812,0	93.96	100.00
		1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	263.688.600,0	247.752.812,0	93.96	100.00
		10 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	12.460.845.317,0	12.335.853.137,0	99.00	99.86
		10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	7.294.595.292,0	7.264.095.909,0	99.58	100.00
		1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	7.151.099.192,0	7.131.070.472,0	99.72	100.00
		2 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	71.187.100,0	68.816.437,0	96.67	100.00
		3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	72.309.000,0	64.209.000,0	88.80	100.00
		10.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	358.282.500,0	310.350.331,0	86.62	100.00
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	158.895.500,0	152.332.198,0	95.87	100.00
		2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	199.387.000,0	158.018.133,0	79.25	100.00

NO	OPD	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
				(Rp)	(%)	
		10.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	2.768.816.600,0	2.754.118.532,0	99.47	100.00
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	102.015.000,0	89.345.932,0	87.58	100.00
		2 Sistem Informasi Penataan Ruang	2.666.801.600,0	2.664.772.600,0	99.92	100.00
		10.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	2.039.150.925,0	2.007.288.365,0	98.44	99.15
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.932.953.625,0	1.930.345.225,0	99.87	100.00
		2 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	35.895.600,0	27.915.600,0	77.77	87.00
		3 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	70.301.700,0	49.027.540,0	69.74	82.00
TOTAL			1.125.710.089.060,0	1.045.300.404.343,0	92.86	97.48

Lampiran 5

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2018 - 2023**

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0%	0 %	-	0 %	-	0 %	104.237.474.792,00	0 %	121.421.071.642,20	0 %	141.722.871.091,79	0 %	367.381.417.525,99	
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi (Prioritas)	59.33%	59.33 %	-	60.06 %	-	60.06 %	131.990.261.967,00	61.72 %	91.951.385.636,26	63.37 %	87.263.073.568,75	63.37 %	311.204.721.172,01	
	Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	74%	74.08 %	-	78.74 %	-	82.47 %	160.619.100,00	86.28 %	25.014.213.853,00	89.62 %	25.933.279.234,00	89.62 %	51.108.112.187,00	
	Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembinaan Layanan TPA Kab/Kota	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	160.955.500,00	100 %	1.000.000.000,00	100 %	45.415.267.958,00	100 %	46.576.223.458,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	77.97%	77.97 %	-	85.03 %	-	87.8 %	160.961.000,00	91.02 %	450.000.000,00	93.55 %	450.000.000,00	93.55 %	1.060.961.000,00	
	Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah Domestik Kab/Kota (SPM)	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Cakupan layanan drainase kewenangan provinsi	0%	0 %	-	0 %	-	0 %	-	16 %	1.700.000.000,00	16 %	550.000.000,00	16 %	2.250.000.000,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pamerintah Yang di Fasilitas	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	164.181.164.792,00	100 %	101.501.919.632,00	100 %	102.450.000.000,00	100 %	368.133.084.424,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	0	5 Kawasan	-	7 Kawasan	-	11 Kawasan	89.841.340.549,00	13 Kawasan	109.353.237.501,00	15 Kawasan	109.404.185.674,00	15 Kawasan	308.598.763.724,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	58	61.52 %	-	65.9 %	-	72.3 %	238.283.321.152,00	74.24 %	229.124.506.350,54	75.09 %	187.201.679.087,46	75.09 %	654.609.506.590,00	
	Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	20.48%	20.48 %		42.72 %		71.79 %		74.25 %		80 %		80 %		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	30%	30 %	-	40 %	-	50 %	999.859.900,00	60 %	1.530.545.240,00	70 %	1.582.072.502,00	70 %	4.112.477.642,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	0.5	0.6	-	0.7	-	0.8	1.773.375.800,00	0.9	5.001.420.000,00	1	4.651.400.000,00	1	11.426.195.800,00	
Grandtotal			-		-			731.789.334.552,00		688.048.299.855,00		706.623.829.116,00		2.126.461.463.523,00	